

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ali, Hasbi, 2014, *Politik Hukum*, Cet. 3, Sinar Grafika, Jakarta.
- Arianto, Setya dkk, 2009, *Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum*, Pusat Perencanaan Hukum Nasional BPHN, Jakarta.
- Asshiddiqie, Jimly, 2002, *Konsolidasi Naskah UUD 1945 Setelah Perubahan Ke Empat*, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok.
- _____, 2005, *Hukum Pengujian Undang-Undang*, Yarsif Watampone, Jakarta.
- _____, 2006, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Anonimous, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta.
- Angraini, Titik dkk, 2011, *Menata Kembali Pengaturan Penyelenggara Pemilu*, Perludem, Jakarta.
- Dahl, Robrt A., 1971, *Polyachy: Opposition and Participation*, Yale University Press, New Haven and London.
- _____, 1985, *Dilema Demokrasi Pluralis, Antara Otonomi dan Kontrol*, terjemahan oleh Sahat Simamora, Rajawali Press, Jakarta.
- Fajar, Mukti dan Achmad, Yulianto, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Friedman, Lawrence M., 1984, *American Law: An Introduction*, WW. Norton and Company, New York.
- Firmantoro, Zuhad Aji, 2017, *Dilema Penanganan Pelanggaran Penyelenggara Pemilu Legislatif*, The Phinisi Press, Yogyakarta.
- Gaffar, Jenedjri M., 2012, *Politik Hukum Penyelenggara Pemilu*, Konstitusi Press, Jakarta.
- Garuda, Abdul Hakim, 1988, *Politik Hukum Indonesia*, YLBHI, Jakarta.
- Harun, Refly, 2016, *Penyelenggara Pemilu Konstitusional: Desain Penyelesaian Sengketa Penyelenggara Pemilu Kini dan Kedepan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

- Harjono, 2008, *Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa, Pemikiran Hukum Dr. Harjono, S.H., M.C.L. Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi*, Sekretariat Jenderal dan Kepanitraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta.
- Harahap, M. Yahya, 2013, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Huda, Ni'Matul dan Nasef, Iman, 2017, *Penataan Demokrasi dan Penyelenggara Pemilu di Indonesia Pasca Reformasi*, Kencana, Jakarta.
- IDEA, International, 2010, *Keadilan Pemilu: Ringkasan Buku Acuan International IDEA*, Indonesia Printer, Jakarta.
- _____, 2010, *Electoral Justice: The International IDEA Handbook*, The International IDEA, Stockholm Swedia.
- _____, 2004, *Standar-standar Internasional Pemilihan Umum: Pedoman Peninjauan Kembali Kerangka Hukum Pemilu*, International IDEA, Jakarta.
- _____, 2004, *Kerangka Hukum Pemilu Indonesia Tahun 2004*, International IDEA, Jakarta.
- IFES, International, 2011, *Pedoman Untuk Memahami, Menangani, dan Menyelesaikan Sengketa Penyelenggara Pemilu*, IFES, Jakarta.
- J. Prihatmoko, Joko, 2008, *Mendemokratiskan Pemilu: Dari Sistem Sampai Elemen Teknis*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- J.H.P., Bellefroid, 1953, *Inleiding tot de Rechtswetenschap in Nederlands*, Dekker & Van Vegnt, Nijmegen Utrecht.
- Junaidi, Veri, 2013, "Bukan Mahkamah Kalkulator", dalam *Masa Depan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Naskah Konferensi Mahkamah Konstitusi dan Pemajuan Hak Konstitusional Warga*, Pustaka Masyarakat Setara, Jakarta.
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2016, *Peranan Pemerintah Dalam Melakukan Pemantauan dan Pengawasan Pilkada Melalui Pelibatan Masyarakat*, Cetakan Pertama, Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan HAM RI, Jakarta.
- Lotulung, Paulus Effendi, 2005, *Aspek Yuridis Dalam Masalah Sengketa Pilkada*, LPP HAN, Jakarta.
- Manan, Bagir, 2001, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, PSH Fakultas Hukum UII, Yogyakarta.

- _____, 2007, *Kekuasaan Kehakiman Indonesia, Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004*, FH UII, Yogyakarta.
- Marzuki, Peter Muhammad, 2005, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta.
- Marbun, B.N., 1996, *Kamus Politik*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Mahkamah Konstitusi RI, 2011, *Tafsir Konstitusional Pelanggaran Penyelenggara Pemilukada yang Bersifat Sistematis, Terstruktur, dan Masif*, Puslitka MKRI, Jakarta.
- M.D., Mahfud, 2007, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, Pustaka LP3ES Indonesia, Jakarta.
- _____, 1998, *Politik Hukum di Indonesia*, LP3S, Jakarta.
- Mudhofir, Ali, 1996, *Kamus Teori dan Aliran Dalam Filsafat dan Teologi*, Gadjahmada University Press, Yogyakarta.
- Muhammad, Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cet. I, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Qardhawi, Yusuf, 1999, *Al-Fiqh Al-Islmi bayn Al-Ashalah wa-at-Tajdid*, Kaهران, Maktabah Wabbah.
- Ramadhanil, Fadli dkk, 2015, *Desain Partisipasi Masyarakat Dalam Pemantauan Penyelenggara Pemilu*, Kemitraan dan Perludem, Jakarta.
- Raharjo, Satjipto, 2003, *Hukum dan Masyarakat*, Alumni, Bandung.
- _____, 1995, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung.
- _____, 2001, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Sakti, Bandung.
- Roejito dan Winahyu, Titik Ariyati dkk, 2013, *Putih Hitam Pengadilan Khusus*, Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial, Jakarta.
- Parasong, Ali Taher, 2014, *Mencegah Runtuhnya Negara Hukum*, Grafindo, Jakarta.
- Putra, Andi Irman, 2008, *Peran Prolegnas Dalam Perencanaan Pembentukan Hukum Nasional Berdasarkan UUD 1945*, BPHN, Jakarta.
- Rizkiyansyah, 2007, *Mengawali Pemilu Menatap Demokrasi (Catatan Penyelenggaraan Pemilu 2004)*, IDEA Publishing, Bandung.

Santoso, Topo, 2012, *Demokrasi Lokal Evaluasi Pemilukada di Indonesia*, Cetakan Pertama, Konstitusi Press, Jakarta.

_____, 2005, *Kepala Daerah Pilihan Hakim*, Harakatuna Publishing, Bandung.

_____ dan Supriyanto, Didik, 2004, *Mengevaluasi Penyelenggara Pemilu Mengawal Demokrasi*, Murai Kencana-PT Raja Gravindo Persada.

_____ dkk, 2006, *Penegakan Hukum Penyelenggara Pemilu: Praktik Penyelenggara Pemilu 2004, Kajian Penyelenggara Pemilu 2009-2014*, Perludem, Jakarta.

Siregar, Fritz Edward, 2018, *Bawaslu Menuju Peradilan Penyelenggara Pemilu*, Themis Publishing, Jakarta.

Suntoro, Agus, 2014, *Laporan Hasil Pemantauan dan Penyelidikan Pemenuhan Hak Konstitusional Warga Negara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden*, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Jakarta.

Suswanto, Gunawan, 2016, *Mengenal Penegak Demokrasi di Balik Tata Kelola Bawaslu dan DKPP*, Penerbit Erlangga, Jakarta.

Surbakti, Ramlan dkk, 2011, *Penanganan Sengketa Penyelenggara Pemilu*, Buku 16 Kemitraan Bagi Pembaharuan Tata Pemerintahan, Jakarta.

Sugiyono, 2009, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, Cet ke.8, Alfabeta, Bandung.

Sukriono, Didik, 2013, *Hukum Konstitusi dan Konsep Otonomi*, Setara Press, Malang.

Sutiyoso, Bambang, 2006, *Penyelesaian Sengketa Bisnis*, Citra Media Hukum, Yogyakarta.

Smith, B. C., 1998, *Local Government and The Transition to Democracy: A review article*, Public Administration and Development.

Soekanto, Soerjono, 2002, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Press, Jakarta.

_____, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta.

Wahyono, Padmo, 1986, *Indonesia Negara Berdasarkan atas Hukum*, Cet. II, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Widodo, Heru, 2018, *Hukum Acara Sengketa Penyelenggara Pemilukada: dinamika di Mahkamah Konstitusi*, Konstitusi Press, Jakarta.

Zaini, Hasan, 1985, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Alumni, Bandung.

TESIS

Fuady, Muhammad Irham dan Supriyadi, “Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pemilihan Umum”, *Tesis*, Magister Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Tahun 2014.

Rajab, Achmanuddin, “Tinjauan Yuridis Pentingnya Pembentukan Peradilan Khusus Penyelenggara Pemilu Dalam Penyelenggara Pemilukada”, *Tesis*, FH UI, Jakarta, Tahun 2013.

Sidik, Ali, “Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Penegakan Hukum Pemilihan Umum (Studi Tentang Interaksi Kelembagaan dalam Penanganan Pelanggaran Pada Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014 di Provinsi Lampung)”, *Tesis*, Magister Ilmu Pemerintahan Universitas Lampung, Bandar Lampung, Tahun 2016.

Sianturi, Budi Evantri, “Penguatan Kelembagaan Panwas Pemilihan Dalam Menyelesaikan Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah, Studi Kasus Penyelesaian Pelanggaran Administrasi, Pidana, dan Kode Etik Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2015”, *Tesis*, Program Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang 2017.

MAKALAH

Mochtar, M. Akil, “Mahkamah Konstitusi Dan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah”, *Makalah*, disampaikan dalam pertemuan koordinasi kerjasama Mahkamah Konstitusi dengan Asosiasi Pengajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi di Hotel Sultan, Jakarta, 2 November 2010.

Satriawan, Iwan dkk, “Reformasi Model Penyelesaian Sengketa Pemilukada di Indonesia”, *Makalah*, disampaikan pada seminar nasional tentang pemilu dan pilkada di Indonesia, di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Tahun 2015.

JURNAL

Andrizal, “Penyelesaian Hukum Pelanggaran Pemilu Dalam Pemilihan Kepala Daerah Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016”, *Jurnal Hukum Republica*, Vol. 17, No. 1, Tahun 2017.

Anggono, Bayu Dwi, “Pembatasan Pengujian Perkara Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah Di Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya Terhadap

Jaminan Keamanan Nasional”, *Jurnal RechtsVinding*, Vol. 5, No. 1, April 2016.

Ayuni, Qurrata, “Gagasan Pengadilan Khusus Untuk Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 48, No. 1, Maret 2018.

Ali, M. Mahrus dkk, “Tafsir Konstitusional Pelanggaran Penyelenggara Pemilukada Yang Bersifat Sistematis, Terstruktur, dan Masif”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 9, No. 1, Maret 2012.

Bisaryadi dkk, “Komparasi Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pemilu di Beberapa Negara Penganut Demokrasi Konstitusional”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 9, No. 3, September 2012.

Dhaniswara, “Konsep Pembangunan Hukum dan Peranannya Terhadap Sistem Ekonomi Pasar”, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 18, No. 4, Oktober 2011.

Faturohman, Deden, “Demokrasi Lokal Dalam Pemilihan Kepala Daerah Langsung di Indonesia”, *Jurnal Legality*, Vol. 12, No. 1, Tahun 2005.

Fahmi, Khairul, “Menelusuri Konsep Keadilan Pemilihan Umum Menurut UUD 1945”, *Jurnal Cita Hukum*, Vol. 4, No. 2, Desember 2016.

_____, “Sistem Penanganan Tindak Pidana Penyelenggara Pemilu”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 12, No. 2, Juni 2015.

Firdaus, “Penyelesaian Sengketa Penyelenggara Pemilu Sebagai Upaya Memulihkan Kepercayaan dan Memperkuat Legitimasi Pemerintahan Demokrasi”, *Jurnal Fiat Justisia*, Vol. 8, No. 2, April-Juni 2014.

Harun, Refly, “Rekonstruksi Kewenangan Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 13, No. 1, Maret 2016.

Hendrawan, Indra, “Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Pasca Putusan MK No. 97/PUU-XI/2013” *Jurnal RechtsVinding*, Vol. 4, No. 1, April 2015.

Huda, Miftakhul, “Pola Pelanggaran Penyelenggara Pemilukada dan Perluasan Keadilan Substantif”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 8, No. 2, April 2010.

Ispryarso, Budi, “Analisis Yuridis Terhadap Kedudukan Pengadilan Pajak Sebagai Pengadilan Khusus Di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara”, *Jurnal MMH*, Jilid 43, No. 1, Januari 2014.

- M. Hantoro, Novianto, “Pelanggaran Administrasi Pemilu dan Sengketa Tata Usaha Negara Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014”, *Jurnal Negara Hukum*, Vol. 5, No. 2, November 2014.
- Marsuki, Suparman, “Peran Komisi Pemilihan Umum Dan Pengawas Penyelenggara Pemilu Untuk Penyelenggara Pemilu Yang Demokratis”, *Jurnal Hukum*, No. 3, Vol. 15, Juli 2018.
- Mahzumi, Ihsan, “Tumpang Tindih Peran dan Wewenang Lembaga Penyelenggara Pemilu dan Lembaga Peradilan Dalam Proses Pembatalan Calon dan Penundaan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah”, *Jurnal Ilmu Politik*, Vol. 10, No. 1, Tahun 2018.
- Nazriah, R., “Penyelesaian Sengketa Pilkada Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 12, No. 3, September 2015.
- Nugraha, Herry Setya, “Redesain Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia”, *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 22, No. 3, Juli 2015.
- Pratiwi, Oktafiani Catur, “Menjaga Kualitas Penyelenggara Pemilu Yang Demokratis”, *Jurnal Bawaslu*, Vol. 3, No. 3, tahun 2017.
- Saihu, Mohammad, “Tren Pelanggaran Penyelenggara Penyelenggara Pemilu Kasus Pilkada 2018”, *Jurnal Etika dan Penyelenggara Pemilu*, Vol. 4, No. 1, Juni 2018.
- Setiadi, Wicipto, “Pembangunan Hukum Dalam Rangka Peningkatan Supremasi Hukum”, *Jurnal Rechvinding*, Vol. 1 No. 1, April 2012.
- _____, “Sanksi Administratif Sebagai Salah Satu Instrumen Penegakan Hukum Dalam Perundang-Undangan”, *Jurnal Legislasi Nasional*, Vol. 6, No. 4, Desember 2009.
- Sihite, Prancis, “Efektifitas Sentra Penegakan Hukum Terpadu Dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014 di Provinsi Riau”, *JOM Fakultas Hukum Universitas Riau*, Vol. II, No. 2, Oktober 2015.
- Sirajuddin dan Solehodin, “Partisipasi Lembaga Swadaya Masyarakat Dalam Mengontrol Praktik Politik Uang Pada Pemilihan Langsung Kepala Daerah”, *Jurnal Konstitusi Universitas Widyagama Malang*, No. 1, Vol. 3, Juni 2010.
- Suhartono, Slamet, “Konstitusionalitas Badan Peradilan Khusus dan MK dalam Penyelesaian Sengketa Hasil Pilkada Langsung”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 12, No. 3, September 2015.

- Sumanto, Dedi, “Penegakan Hukum dan Pembangunan Hukum di Indonesia”, *Jurnal Al-Mizan*, Vol. 10, No. 1, Juni 2014.
- Sumarno, “Sengketa Pilkada Depok dan Jalan Panjang Menuju Demokrasi”, *Jurnal Demokrasi dan HAM*, Vol. 6, No. 2, Tahun 2006.
- Waid, Abdul, “Meneguhkan Bawaslu Sebagai Lembaga Peradilan Dalam Bingkai Pengawasan Penyelenggara Pemilu”, *Jurnal Adhyatsa Penyelenggara Pemilu*, Vol. 4, No. 1, Tahun 2018.
- Wicaksono, Dian Agung dan Ayutama, Ola Anisa, “Inisiasi Pengadilan Khusus Pemilihan Kepala Daerah Dalam Menghadapi Kesenjangan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota”, *Jurnal RechtsVinding*, Vol. 4, No. 1, April 2015.
- Yahya, Nur, “Rekonstruksi Hukum Untuk Mewujudkan Indonesia Baru”, *Jurnal Perspektif*, Vol. 6, No. 3, Juli Tahun 2001.
- Zoelva, Hamdan, “Problematika Penyelesaian Sengketa Hasil Penyelenggara Pemilu Oleh Mahkamah Konstitusi”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 10, No. 3, September 2013.
- _____, “Tinjauan Konstitusional Penataan Lembaga Non-Struktural di Indonesia”, *Jurnal Negarawan*, Sekretarian Negara RI, November 2010.

INTERNET

- Ali, “Mahkamah Agung Resmi Limpahkan Hasil Pilkada ke Mahkamah Konstitusi”, *hukumonline.com*, diakses tanggal 2 Maret 2019.
- Angraini, Titik, “Bawaslu Diusulkan Jadi Badan Penyelesaian Sengketa Penyelenggara Pemilu”, *Republika.co.id*, diakses tanggal 17 Maret 2019.
- Budiarti, Ida, “Bawaslu Diusulkan Untuk Diganti Menjadi Pengadilan Penyelenggara Pemilu”, *regional.kompas.com*, diakses tanggal 20 Maret 2019.
- Faiz, Pan Mohamad, “Quo Vadis Sengketa Pilkada”, *Sindonews.com*, diakses tanggal 12 Maret 2019.
- Hatta, “MK-MA Ingatkan Pembentukan Peradilan Khusus Sengketa Pilkada”, *hukumonline.com*, diakses tanggal 13 Maret 2019.
- Paat, Yustinus, “Segera Bentuk Lembaga Peradilan Khusus Penyelenggara Pemilu”, *beritasatu.com*, diakses tanggal 15 Maret 2019.

_____, “Bawaslu Dianjurkan Bertransformasi Jadi KPHP di Penyelenggara Pemilu 2019”, *beritasatu.com*, diakses tanggal 20 Maret 2019.

Setiawan, Wahyu, “Pilgub Jateng Tanpa Pemantau Independen”, *SuaraMerdeka.com*, diakses tanggal 1 Maret 2019.

Surbakti, Ramlan, “Pemilu Berintegritas dan Adil”, *Harian Kompas*, edisi 14 Februari 2014.

Olin, Fidelis, “Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan Calon Tunggal di TTU Tanpa Pemantau”, *daerah.sindonews.com*, diakses tanggal 28 Februari 2019.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437).

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700).

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844).

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678).

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898).

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4494).

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan Terhadap Penetapan Hasil Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Pilwakada Dari KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Peraturan Bersama Bawaslu, KPU, DKPP Nomor 13, Nomor 11, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum.

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Dengan Satu Pasangan Calon.

Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 14, Nomor 01, Nomor 010/JA/11 tahun 2016 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.